

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT  
INDONESIA-MALAYSIA (STUDI EVALUATIF  
DI KECAMATAN ENTIKONG)**

***INDONESIA'S POLICY ON THE LAND BORDER AREA MANAGEMENT  
WITH MALAYSIA (AN EVALUATIVE STUDY IN THE  
ENTIKONG DISTRICT)***

Sandy Nur Ikfal Raharjo

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI Lt. XI  
Jln. Jend. Gatot Subroto No.10, Jakarta 12710  
Pos-el: sandy.raharjo@gmail.com

***ABSTRACT***

*Indonesian government has implemented new paradigm on the land border area management by combining security and prosperity approaches. This Evaluative research compared Entikong border area condition in West Kalimantan when the combined-approach based policy is implemented, with the condition before. The result showed that this policy is potential to solve infrastructure weakness, trade dependence on Malaysia, poor education, threat to nationalism, and lack of coordination among institutions. But, this combined approach also proved lack of attention toward socio-culture aspect in local community. This research recommends Indonesian government to ask for active society involvement in decision making process and implementation of the policy on the land border area management. Thus, the objectives of security, prosperity, and socio-culture will be reached together.*

**Keywords:** *Entikong, Border area, Policy, Prosperity, Security, Socio-culture*

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat dengan menggabungkan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Penelitian evaluatif ini membandingkan kondisi kawasan perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, pada saat kebijakan melalui dua pendekatan diterapkan dengan kondisi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menyelesaikan masalah infrastruktur yang kurang, kebergantungan sektor perdagangan pada Malaysia, tingkat pendidikan yang rendah, ancaman terhadap nasionalisme, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Namun, gabungan pendekatan ini kurang memerhatikan aspek sosial budaya masyarakat perbatasan setempat, sehingga berpotensi merusak tatanan masyarakat lokal yang sudah ada. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah agar melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam merumuskan dan megimplementasikan kebijakan di kawasan perbatasan sehingga tujuan keamanan, kesejahteraan, dan sosial-budaya bisa dicapai bersama.

**Kata kunci:** Entikong, Kawasan perbatasan, Kebijakan, Kesejahteraan, Keamanan, Sosial-Budaya

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.110 pulau, luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km<sup>2</sup> dan wilayah perairannya

5,8 juta km<sup>2</sup>. Geografi yang luas ini membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan dengan banyak negara. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan

Papua Nugini sepanjang 3092,8 km. Sementara itu, wilayah lautnya berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini.<sup>1</sup> Perbatasan laut ini mencakup 92 pulau kecil terdepan, mulai dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Dana di selatan.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya.<sup>1</sup>

Kondisi kawasan perbatasan Indonesia yang memprihatinkan akan lebih jelas terlihat jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara lain yang lebih maju. Dari tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, Malaysia dianggap lebih maju dalam mengelola kawasan perbatasannya. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.004 km yang berada di 16 kecamatan di Kalimantan Barat dan 14 kecamatan di Kalimantan Timur. Setidaknya ada tiga masalah umum yang muncul di kawasan perbatasan darat ini. *Pertama*, masih ada 9 titik demarkasi yang belum disepakati antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan darat, yaitu titik Tanjung Datu, D.400, Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Aum, C500-C600, B2700-B3100, Sungai Semantipal, dan Sungai Sinapad.<sup>2</sup> *Kedua*, beberapa bagian kawasan perbatasan RI-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan orang dan sumber daya alam. Daerah yang terkenal rawan kejahatan ini antara lain Entikong-Tebedu, Badau-Lubok Antu, dan Sebatik-Tawau. *Ketiga*, tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan relatif rendah. Tiga masalah umum inilah yang menjadi ancaman nyata di kawasan perbatasan.

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, dibutuhkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan darat dengan Malaysia. Kebijakan ini penting karena pembiaran masalah bisa mengakibatkan kehilangan wilayah kedaulatan, runtuhnya rasa nasionalisme warga perbatasan, perpindahan kewarganegaraan dari WNI ke WN Malaysia secara masif, ketegangan politik antarnegara, dan yang paling ekstrem adalah konflik yang berujung pada perang dua negara seperti yang hampir terjadi pada Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1962.

Pemerintah Indonesia kini tampak memberikan perhatian yang lebih serius bagi kawasan perbatasan. Hal itu tecermin dari dimasukkannya kawasan perbatasan sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan 2010–2014, dengan beberapa kecamatan di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia menjadi lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja masalah utama yang terjadi di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan daratnya dengan Malaysia?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan tersebut dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah utama di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia, mengetahui kebijakan pemerintah untuk mengelolanya, dan menganalisis dampak kebijakan dalam mengatasi masalah utama yang ada di kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada ataupun menggagas kebijakan yang baru, yang berfungsi sebagai substitusi atau komplementer bagi kebijakan yang lama.

Perbatasan merupakan konsep yang merujuk pada suatu area yang dibatasi secara geografis, politik, dan budaya yang memisahkan kedaulatan suatu negara dengan negara lain. Dari pengertian

ini, negara menjadi aktor yang dominan dalam mengelola perbatasan yang menjadi teritorinya, baik dalam unsur wilayah, orang, maupun pemerintahan yang efektif.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Wilayah negara didefinisikan sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu, pengelolaan kawasan perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola batas kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga keutuhan kawasannya baik darat, laut maupun udara.<sup>4</sup> Fokus pengelolaan kawasan perbatasan ini kemudian diakomodasi melalui dua pendekatan. *Pertama*, kedaulatan kawasan diusahakan melalui pendekatan keamanan. *Kedua*, pemanfaatan sumber daya alam berusaha dicapai melalui pendekatan kesejahteraan. Seyogianya, pemanfaatan sumber daya alam ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Namun, dapat pula diartikan pemanfaatan sumber daya alam melalui eksploitasi oleh perusahaan besar yang diberi izin oleh negara dan tidak melibatkan warga lokal yang justru mengancam sumber kehidupan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, diperlukan pengembangan pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan agar kepentingan kedaulatan dan kesejahteraan bisa dicapai bersama, baik bagi negara maupun bagi masyarakat perbatasan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif. Penelitian evaluatif adalah proses untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dampak, serta relevansi secara sistematis dan objektif terhadap serangkaian kegiatan dalam program beserta segenap tujuan yang akan dicapai.<sup>5</sup> Studi evaluatif menilai konseptualisasi,

rancangan, implementasi, dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu program intervensi sosial.<sup>5,6</sup> Penelitian evaluatif ini dilakukan pada saat pelaksanaan program (*on going evaluation*).

Dari 30 kecamatan yang berada di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia, peneliti memilih Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagai daerah penelitian. Entikong dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Tebedu yang berada di negara bagian Serawak, Malaysia. *Kedua*, hingga akhir tahun 2012, di Entikong terdapat satu-satunya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia. *Ketiga*, kecamatan ini termasuk salah satu dari 26 kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ditetapkan melalui PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Nasional. Fakta mengenai PPLB dan status PKSN di Entikong ini kemudian menyiratkan perhatian pemerintah yang besar terhadap kecamatan ini. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah menemukan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan kawasan perbatasan darat dan implementasinya di kecamatan ini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini setidaknya bisa memberikan gambaran umum bagi kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia lainnya yang juga menjadi kawasan prioritas pemerintah serta kawasan-kawasan lain yang di kemudian hari akan dijadikan kawasan prioritas selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan dari April 2010 hingga Maret 2012. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus, dan observasi untuk verifikasi data wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan *workshop/seminar* di Universitas Indonesia dan Pansus Perbatasan Negara DPD RI. Informan di Entikong terdiri atas para pejabat yang berkepentingan di kota Sanggau dan Kecamatan Entikong, serta warga di kawasan tersebut. Adapun FGD dilakukan dengan mengundang pejabat BNPP, Bappenas, dan Walhi.

Analisis data dilakukan dengan melihat masalah-masalah utama di kawasan perbatasan Entikong mana saja yang sudah atau berpotensi

terselesaikan oleh kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian, bisa didapat gambaran efektivitas kebijakan tersebut secara umum dan hal-hal apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masalah di Kawasan Perbatasan Darat Kecamatan Entikong

Entikong merupakan salah satu kecamatan di kawasan perbatasan yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari lima desa yang masuk administrasi kecamatan, empat desa di antaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Desa Entikong, Pala Pasang, Suruh Tembawang, dan Semanget.

Gambar 1 memperlihatkan jarak kecamatan Entikong yang lebih dekat ke Serian, semacam ibu kota kabupaten di Serawak, Malaysia, bila dibandingkan jarak ke ibu kota Kabupaten Sanggau. Hal ini menyebabkan warga di kelima desa di Entikong banyak melakukan interaksi dengan pihak Malaysia.

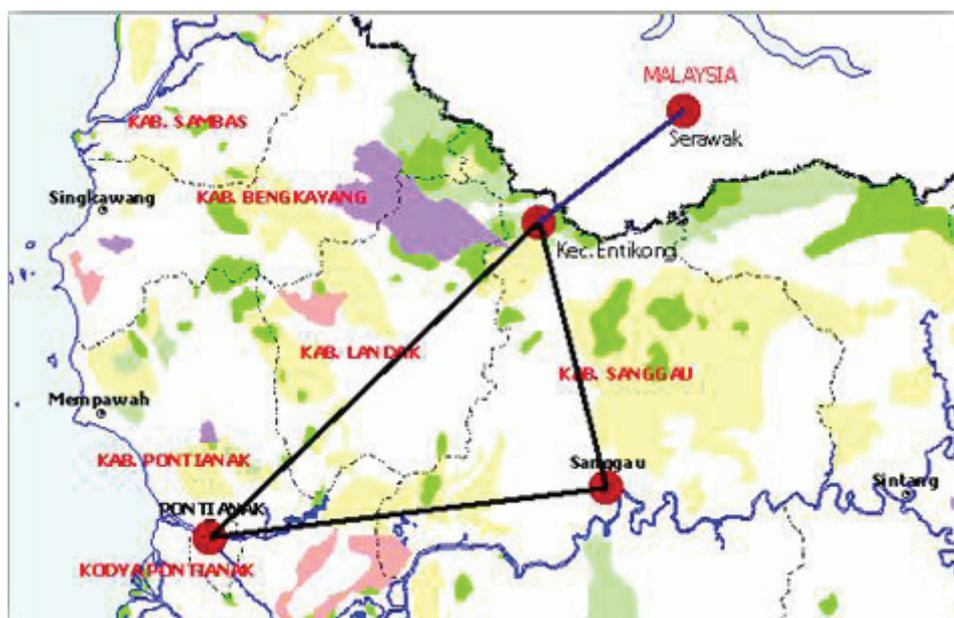
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan aparat pemerintah daerah di tingkat kabupaten-kecamatan-desa, aparat TNI di Sanggau dan Entikong, serta masyarakat En-

tikong, teridentifikasi masalah-masalah kawasan perbatasan yang kemudian peneliti bagi dalam lima sektor, yaitu infrastruktur, perdagangan dan ekonomi lainnya, pendidikan, sosial-budaya, dan pemerintahan.

### A. Infrastruktur

Warga perbatasan di Entikong menghadapi dua kendala utama dalam sektor ini. Pertama, infrastruktur jalan masih belum baik dan merata. Kualitas jalan raya Malaysia-Indonesia (Malindo) dari Balai Karangan hingga PPLB Entikong secara umum memang baik, tetapi jalan-jalan desa masih belum tertangani. Di Desa Nekan, akses masuk dari jalan raya Malindo menuju desa masih berupa tanah liat dan hanya bisa dilalui ojek motor. Jika hujan turun, jalanan menjadi licin dan hanya beberapa tukang ojek asli Nekan yang berani melewatinya. Sementara untuk Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang, tidak ada jalan darat dari kota kecamatan. Warga hanya bisa menggunakan transportasi air Sungai Sekayam. Untuk sekali perjalanan pulang-pergi, biaya sewa perahu antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,4 juta.

Masalah kedua adalah pasokan listrik yang belum merata. Desa Entikong dan Semanget sudah mendapatkan aliran listrik 24 jam. Sementara untuk Nekan, Pala Pasang, dan Suruh Tembawang, tidak ada aliran listrik dari PLN.



Sumber: <http://sttnas.ac.id/wp-content/uploads/2011/07/entikong.jpg>

**Gambar 1.** Peta Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Entikong

Warga menggunakan genset untuk memperoleh listrik dengan kendala suplai bahan bakar yang sulit dan mahal.

### **B. Perdagangan dan Ekonomi Lainnya**

Mayoritas penduduk Entikong adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian, terutama lada dan kacang tanah ke para cukong Malaysia. Menurut warga Suruh Tembawang dan Nekan, mereka lebih suka menjual hasil pertaniannya ke Malaysia karena jarak yang lebih dekat dan harga yang cukup kompetitif. Kondisi di atas menyiratkan bahwa sisi produksi hasil pertanian di Entikong bergantung pada Malaysia untuk membeli hasil panen mereka.

Dari sisi konsumsi, banyak produk buatan Malaysia yang beredar di Entikong secara bebas. Hal ini terjadi karena barang-barang dari dalam negeri yang umumnya dipasok dari Pontianak stoknya terbatas. Sementara itu, produk Malaysia bisa dengan mudah dibeli di Tebedu yang hanya berjarak 10 menit dari Pusat Kecamatan Entikong dan harganya relatif murah bila dibandingkan dengan produk sejenis dari Indonesia. Karena banyaknya permintaan produk Malaysia ini, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan peraturan pembatasan nilai barang yang dibeli dari Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia maksimal 600 ringgit. Warga Entikong menuntut agar batas ini dinaikkan tetapi hingga akhir tahun 2011 belum juga dikabulkan. Akibatnya, banyak terjadi penye-lundupan barang Malaysia yang tidak hanya dijual di kecamatan Entikong dan sekitarnya, tetapi juga sampai di Kota Sanggau. Dengan demikian, sisi konsumsi warga perbatasan Entikong pun bergantung pada produk-produk Malaysia.

Secara garis besar, kebergantungan sisi produksi dan konsumsi warga Entikong yang mengandalkan Malaysia menimbulkan kerawanan ekonomi. Jika pemerintah Malaysia melarang pendistribusian barang-barang mereka ke Entikong, warga akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Padahal hingga saat ini, belum ada kerja sama Indonesia-Malaysia yang menjamin keberlangsungan distribusi barang-barang Malaysia di Entikong. Pemerintah Indonesia malah menunjukkan iktikad agar kebutuhan primer warga Entikong bisa dipenuhi

dari dalam negeri dengan pemberlakuan kuota belanja. Sayangnya, hal ini tidak didukung dengan kebijakan agar distribusi barang-barang dari Pontianak dan wilayah lainnya ke Entikong berjalan dengan baik dan efisien agar persediaan barang tercukupi dan harganya terjangkau.

### **C. Pendidikan**

Dari segi institusi, terdapat 72 sekolah dasar (SD) yang tersebar di semua desa di Kecamatan Entikong; 3 sekolah menengah pertama (SMP) yang terdapat di Desa Entikong, Semanget, dan Suruh Tembawang; serta 2 sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun, jumlah tenaga guru juga tidak tersebar merata. Di Entikong dan Semanget, rata-rata jumlah guru per SD lebih dari 6 orang, sedangkan di desa lain rata-rata jumlah guru 2-3 per SD. Bahkan untuk SMP Suruh Tembawang, hanya ada satu guru PNS.<sup>7</sup>

Selain itu, di Kecamatan Entikong banyak anak putus sekolah. Salah satu alasannya adalah akses anak-anak tersebut untuk pergi ke sekolah. Di dusun Puntir Ngkaras, siswa kelas 4-6 SD harus berjalan sekitar 1 jam untuk pergi ke SD di Dusun Puntir Meraga. Hal ini juga terjadi di Suruh Tembawang. Alasan lain adalah kemiskinan orang tua sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hingga awal tahun 2010 sebanyak 43,42% warga Entikong hanya lulusan SD, disusul tidak tamat SD 31,29%, dan tamat SMP 19,81%.<sup>7</sup>

### **D. Sosial Budaya**

Masyarakat lokal Entikong dan Tebedu sebagian besar merupakan suku Dayak Bidayuh. Dalam masyarakat Dayak Bidayuh di Malaysia, kebudayaan mereka sengaja dipelihara dan bahkan dijadikan objek wisata. Di Kampung Tringgus Matan Nguan-Serawak, Pemerintah Malaysia bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) mengembangkan program *Community Based EcoTourism* (CBET). Sementara di sisi Indonesia, warga Dayak Bidayuh Kampung Badat Lama justru harus menghadapi kenyataan bahwa tanah ulayat mereka dijadikan hutan lindung oleh pemerintah sehingga warga tidak boleh mengambil kayu dan sumber daya alam lainnya di hutan tersebut.<sup>8,9</sup>

Selain itu, terdapat kerawanan perpindahan kewarganegaraan. Ada dua penyebab utama, yaitu disparitas kesejahteraan antardesa di perbatasan kedua negara dan pernikahan campur. Perpindahan kewarganegaraan tidak hanya terjadi di kawasan perbatasan yang terisolasi seperti Suruh Tembawang, tetapi juga di Desa Entikong melalui jalur pernikahan, dan mayoritas WNI akhirnya ikut pasangannya menjadi warga negara Malaysia.

Masalah lain yang mengancam kondisi sosial-budaya adalah peredaran minuman keras dari Malaysia. Warga Dayak memang terbiasa minum tuak dalam acara khusus seperti gawai dan penyambutan tamu. Akan tetapi, masuknya minuman keras modern dari Malaysia membuat banyak pemuda suka mabuk-mabukan, terutama saat malam minggu. Hal ini meresahkan kalangan orang tua karena anak muda tidak bisa diharapkan untuk meneruskan warisan adat-istiadat. Dengan demikian, dikhawatirkan budaya Dayak Bidayuh akan meluntur. Selain itu, kebiasaan mabuk di kalangan anak muda juga sering dikaitkan dengan kemalasan mereka untuk bekerja, terutama ke ladang.

Entikong juga menjadi transit Tenaga Kerja Indonesia legal ataupun tidak berdokumen. Mereka berasal dari wilayah sekitar Entikong ataupun wilayah Indonesia lainnya dan umumnya menyasar bekerja sebagai penjaga perkebunan, buruh bangunan, atau pembantu rumah tangga. *Human trafficking* juga terjadi di Entikong. Pada umumnya para perempuan dijadikan pekerja seks komersial, dan di Entikong sendiri, terdapat satu lokalisasi tidak resmi di dekat perbatasan.

### **E. Pemerintahan**

Di masyarakat Entikong, ada kalimat terkenal berbunyi “hanya malaikat saja yang belum ke sini”. Hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak pejabat pusat ataupun daerah yang berkunjung ke Entikong, menandakan bahwa banyak lembaga negara yang memberi perhatian. Namun, kondisi Entikong masih belum berkembang menjadi seperti apa yang diharapkan masyarakat. Faktor yang dianggap menjadi penyebabnya adalah tidak ada koordinasi antardepartemen sehingga banyak terjadi pemubaziran program, misalnya, bangunan rumah susun sewa (rusunawa) bertahun-tahun tidak digunakan karena tidak ada pasokan listrik

dan air. Demikian pula dengan pembangunan pasar baru di dekat perbatasan yang terbengkalai. Selain itu, benturan kewenangan juga menjadi kendala. Jika pengelolaan kawasan Entikong ditangani oleh pemerintah pusat, mereka tidak tahu kondisi riil di lapangan. Sementara jika pengelolaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mereka tidak punya dana yang cukup.

Dari masalah utama kawasan perbatasan Entikong di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dua sumber masalah. *Pertama*, sumber internal yang berkaitan dengan ketidakmampuan/ketidaksadaran pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan secara baik, kebergantungan pada pemerintah pusat, dan sikap masyarakat Entikong. *Kedua*, sumber eksternal yang berkaitan dengan peran Malaysia dalam segi positif maupun negatif.

### **Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Kawasan Perbatasan di Entikong**

Salah satu tindakan signifikan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan ini mengoordinasi 18 kementerian dan lembaga negara untuk membangun kawasan perbatasan.<sup>10</sup> Dengan demikian, masalah koordinasi antardepartemen dan pembagian kewenangan yang lebih jelas bisa diakomodasi. Ada tiga pendekatan yang digunakan BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan.<sup>11</sup>

Dalam pendekatan keamanan, kebijakan pemerintah sudah lama diterapkan, sehingga TNI yang juga masuk dalam lingkaran koordinasi BNPP mengambil peran terbesar. TNI mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan tiga pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma). Pos Gabma ini merupakan bentuk kerja sama militer Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan mereka. Walaupun media mengisukan adanya perpindahan tapal batas, tetapi menurut pengakuan aparat TNI hal itu tidak terjadi, karena titik tapal batas ditentukan

melalui koordinat, bukan bentuk tapal secara fisik. Sementara untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui program TNI Masuk Desa. Di Entikong, mereka membantu merapikan dan memperlebar jalan desa di Nekan pada tahun 2011. Dengan demikian, diharapkan agar masyarakat merasa terbantu dan citra TNI di perbatasan yang dianggap penghalang bisa terkikis.

Dalam pendekatan kesejahteraan, peran pemerintah terepresentasikan dalam kegiatan-kegiatan BNPP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, inti kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut: 1) mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana *custom, immigration, quarantine and security* (CIQS) di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB); 2) mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; 3) mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan; dan 4) mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan.

Empat inti kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk penetapan lokasi-lokasi prioritas (lokpri) di kawasan perbatasan. Namun, tidak semua kawasan perbatasan dijadikan lokpri dalam waktu yang sama. Hal ini terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas. Untuk tahun 2012, anggaran untuk prasarana jalan, kesejahteraan, dan kesehatan di kawasan perbatasan sebesar Rp2,843 triliun. Dana tersebut tersebar di 18 kementerian dan lembaga negara lainnya yang dikoordinasi oleh BNPP.<sup>1</sup> Padahal, ada 111 kecamatan yang masuk kategori kawasan perbatasan di 38 kabupaten/kota di 12 provinsi. Dengan demikian, untuk tahun 2012 BNPP memilih 28 lokpri tahap awal, di mana salah satunya adalah Entikong. Kecamatan ini terpilih sebagai kawasan yang potensial untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Lokpri pusat pertumbuhan ini memiliki kelebihan dibanding lokpri biasa, yaitu posisi geostrategis, potensi fisik kawasan, potensi sosial budaya, serta dukungan teknis administrasi, politis, dan finansial. Kecamatan ini memiliki *exit/entry*

*point* yang menandai interaksi sosial, budaya, dan ekonomi yang intensif dengan penduduk negara tetangga, yaitu Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu.

Sebagai pendekatan ketiga, lingkungan merupakan pendekatan yang baru diperkenalkan untuk mendampingi pendekatan sebelumnya, terutama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini berusaha menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Namun, penerapan pendekatan ini belum bisa peneliti temukan. Memang ada penetapan hutan lindung di hutan sekitar Suruh Tembawang. Akan tetapi, sepanjang tepi sungai menuju Suruh Tembawang justru banyak terdapat hutan sawit. Selain itu, penetapan hutan lindung ini tidak memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal. Ladang berpindah dianggap merusak lingkungan, sedangkan pengusaha hutan sawit justru diberi Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

### **Dampak Kebijakan terhadap Masalah Perbatasan di Entikong**

Dari kebijakan pemerintah Indonesia yang direpresentasikan melalui tiga pendekatan di atas, dampak secara nyata terhadap lima masalah utama kawasan perbatasan darat di Entikong yang diidentifikasi di atas mungkin belum terlihat. Hal ini mengingat BNPP baru dibentuk pada 17 September 2010, dan kebijakan Entikong sebagai lokpri pusat pertumbuhan baru dimulai pada tahun 2012. Namun, program-program yang dikoordinasi oleh BNPP memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah utama tersebut.

Pada masalah kurangnya infrastruktur, BNPP sudah melakukan pengaspalan jalan masuk menuju desa Nekan dan sedang melaksanakan pembangunan jalan darat (tanah) menuju Pala Pasang dan Suruh Tembawang, walaupun hingga awal 2012 belum selesai. Kebutuhan listrik juga sudah mulai dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Desa Nekan dan pembagian panel-panel surya di desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang, walaupun jumlahnya masih sangat terbatas.

Kemudian pada masalah perdagangan dan ekonomi lainnya, perencanaan Entikong menjadi Bandar Entikong Jaya berpotensi membuat aktivitas perdagangan akan meningkat pesat. Saat ini, di Entikong juga sudah berdiri bangunan pasar perbatasan. Meski demikian, perlu diperhatikan masalah dependensi pemasaran hasil produksi warga Entikong dan suplai barang kebutuhan pokok kepada Malaysia. Sampai saat ini, kuota belanja 600 ringgit masih diberlakukan, sedangkan suplai barang dari Pontianak juga masih belum ditambah. Pemerintah sepertinya perlu mempertimbangkan kerja sama ekspor-impor dengan Malaysia untuk suplai barang kebutuhan di Entikong jika memang belum mempunyai kemampuan untuk melakukannya secara mandiri.

Sementara itu, masalah pendidikan sudah diakomodir melalui inti kebijakan BNPP no. 3, yaitu ”mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan”. Sekolah baru sudah mulai dibangun, seperti di Dusun Badat Lama dan Desa Suruh Tembawang. Selain itu, diadakan pula SD kelas jauh di Dusun Pundi Ngkaras Desa Nekan, sehingga anak-anak kelas 1-3 tidak perlu datang ke sekolah induk untuk belajar, tetapi gurulah yang mendatangi dusun mereka. Apalagi, masalah pendidikan di Entikong terkait erat dengan infrastruktur jalan menuju ke sekolah. Dengan perhatian yang besar pada infrastruktur jalan, diharapkan masalah pendidikan juga ikut tertangani.

Selain itu, masalah sosial budaya berupa kerawanan perpindahan WNI mungkin bisa diatasi dengan peningkatan kesejahteraan warga Entikong, sehingga tidak lagi berorientasi ke Malaysia. Berjalannya fungsi pemerintahan di desa-desa perbatasan juga berpotensi membantu menguatkan nasionalisme. Namun, pembangunan Bandar Entikong Jaya cenderung meningkatkan potensi masalah anak muda Entikong yang suka minum minuman keras dan mulai meninggalkan budaya Dayak Bidayuh mereka. Apalagi, pembangunan pusat pertumbuhan akan membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran. Warga Dayak yang biasa hidup di pinggir/di dalam hutan dan biasa bergantung pada sumber daya hutan nantinya akan kehilangan tumpuan kehidupannya selama ini, dan berarti harus merubah budayanya secara

ekstrem untuk menjadi masyarakat perkotaan. Kemudian, pertumbuhan Entikong sebagai pusat pertumbuhan secara umum dapat mengurangi TKI tidak berdokumen dari warga lokal sendiri karena lapangan pekerjaan bertambah. Di sisi lain, *human trafficking* masih mungkin terjadi. Karena itu, penguatan pengamanan kawasan Entikong perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, BNPP sudah memiliki hubungan koordinasi dengan Polri dan TNI sehingga masalah ini berpotensi terselesaikan.

Untuk masalah koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan, pembentukan BNPP melalui Perpres No.12 Tahun 2010 seharusnya sudah bisa mengatasi persoalan ini. Apalagi, BNPP mempunyai kekuatan menekan kepada lembaga yang terkoordinasi dengannya melalui laporan yang bisa diampaikan kepada Presiden dan bisa turut menentukan nilai rapor lembaga tersebut.

## KESIMPULAN

Ada lima masalah utama yang dihadapi kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, yaitu 1) kurangnya infrastruktur, 2) kebergantungan sektor perdagangan pada pemasaran produk dan penyediaan barang kebutuhan pokok dari Malaysia, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan warga Entikong, 4) terancamnya nasionalisme warga Entikong, dan 5) tidak adanya koordinasi antardepartemen dan bias kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui BNPP menjadikan Entikong sebagai lokasi prioritas pusat pertumbuhan, sehingga pendekatan keamanan dan kesejahteraan menonjol, sedangkan pendekatan lingkungan belum terimplementasikan. Kebijakan Entikong sebagai pusat pertumbuhan ini secara garis besar berpotensi menyelesaikan masalah-masalah utama di atas.

Sebagai dampak dari kebijakan lokpri tersebut, warga desa perbatasan saat ini mulai menikmati akses jalan dari desa mereka menuju kota kecamatan, walaupun belum menjangkau semua desa perbatasan. Kehidupan ekonomi juga lebih berkembang dengan hadirnya pasar perbatasan, walaupun masih tetap bergantung pada suplai dari Malaysia. Pembangunan gedung sekolah dan

pendirian kelas jarak jauh juga memperlebar akses pendidikan bagi anak-anak perbatasan. Semakin terasanya kehadiran pemerintah melalui bangunan fisik dan fungsi administrasi pemerintahan juga berpotensi menguatkan nasionalisme warga perbatasan. Meski demikian, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Aspek sosial budaya warga Entikong yang mayoritas Dayak Bidayuh dan terbiasa hidup dekat dengan hutan tidak terlalu diperhatikan. Mereka kemungkinan akan dipaksa meninggalkan cara hidup mereka selama ini dan beralih ke cara hidup orang kota dalam waktu singkat.

Dengan demikian, pemerintah melalui BNPP sepertinya harus mereformulasikan kebijakan Entikong sebagai pusat pertumbuhan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan tidak terjebak pada keinginan pemerintah saja, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu dijajaki pula potensi pengembangan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan Malaysia yang selama ini masih berfokus pada aspek keamanan, dilebarkan ke aspek kesejahteraan dan sosial-budaya. Dengan demikian, kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan sosial-budaya kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia akan dapat dipenuhi secara bersama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada (1) tim Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia 2010 di Pulau-Pulau Terdepan dan Perbatasan yang memberikan kesempatan kepada peneliti turun lapangan di Kecamatan Entikong; (2) Tim penelitian kompetitif Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI ”Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Gender” tahun 2012 atas kerja bersama untuk melakukan wawancara dan FGD di Jakarta; dan (3) Prof. Rusdi Muchtar, M.A., A.P.U. atas bimbingan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup>Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.
- <sup>2</sup>Mulyana, Agung. 2012. Kebijakan Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan. *Presentasi dalam Diskusi Masalah, Kebijakan, dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- <sup>3</sup>Ladis K. D. Kristof, 1959, *The Nature of Frontiers and Boundaries*, Taylor and Francis Ltd. (<http://www.jstor.org/stable/2561460>, diakses 26 Januari 2012)
- <sup>4</sup>Lembaga Administrasi Negara. 2004. *Kajian Manajemen Kawasan Perbatasan Negara*. Laporan Penelitian, Pusat Kajian Administrasi Internasional. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- <sup>5</sup>Winarno, Endro. 2004. *Penelitian Evaluatif tentang Eksistensi Karang Taruna dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS.
- <sup>6</sup>Rossi, Peter H dan Howard E. Freeman. 1986. *Evaluation A Systematic Approach*. 3<sup>rd</sup> Edition. New Delhi: Sage Publications.
- <sup>7</sup>Kecamatan Entikong. 2010. *Laporan Pemerintahan Kecamatan Entikong 2009*. Sanggau: Pemerintah Kecamatan Entikong.
- <sup>8</sup>TVOne. 2010. *Beranda Belakang* (Video). Sanggau: TVOne.
- <sup>9</sup>Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2011. Pekerjaan Rumah Perbatasan Indonesia-Malaysia. (<http://politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/526-pekerjaan-rumah-perbatasan-indonesia-malaysia> diakses 25 Maret 2012).
- <sup>10</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang BNPP. (<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/415.pdf> diakses 25 Maret 2012)
- <sup>11</sup>Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011–2025*. Jakarta: BNPP.

